

PROBLEMATIKA POLITIK IDENTITAS DI NEGARA DEMOKRASI

Muhammad Rosyid Ridho¹, Ryan Fachryan Lesmana Putra²

Sekolah Tinggi Agama Islam Mulia Astuti Wonogiri
muhammadrosyid726@gmail.com

Abstrak

Memasuki tahun politik, fenomena politik identitas pasti juga akan mulai terdengar kembali. Fenomena politik identitas tersebut menjadi tantangan terberat bangsa, karena akan berujung pada disintegrasi bangsa. Terlebih pada negara sistem demokrasi yang memiliki budaya multikultural seperti Indonesia. Berdasarkan fenomena tersebut, penulis akan melakukan penelitian terkait problematika politik identitas di negara demokrasi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apa saja permasalahan politik identitas di negara demokrasi khususnya negara Indonesia sebagai negara yang multikultural. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif yakni dengan menjelaskan terkait fenomena politik identitas. Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan fenomenologis yang bersifat deskriptif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah library research. Kesimpulan dari penelitian ini adalah politik identitas sebenarnya dibolehkan akan tetapi pada porsi yang tepat. Namun pada kenyataannya mereka berlebihan dan cenderung memantik sebuah konflik antar agama, suku dan budaya. Politik identitas dapat menjadi ancaman demokrasi di Indonesia dikarenakan aspirasi politik yang hanya terpaku pada salah satu identitas tertentu sehingga berpotensi menghilangkan identitas lain di masyarakat

Kata Kunci: Politik, Politik Identitas, Negara Demokrasi.

Abstract

Entering the political year, the phenomenon of identity politics will definitely start to be heard again. The phenomenon of identity politics is the nation's toughest challenge, because it will lead to national disintegration. Especially in democratic countries that have a multicultural culture like Indonesia. Based on this phenomenon, the author will conduct research related to the problems of identity politics in democratic countries. The aim of this research is to find out what the problems of identity politics are in democratic countries, especially Indonesia as a multicultural country. The method used in this research is qualitative, namely by explaining the phenomenon of identity politics. The approach used is a descriptive phenomenological approach. The data collection technique in this research is library research. The conclusion from this research is that identity politics is actually permitted, but in the right portion. However, in reality they are excessive and tend to spark conflict between religions, ethnicities and cultures. Identity

politics can be a threat to democracy in Indonesia because political aspirations are only focused on one particular identity, thereby potentially eliminating other identities in society

Keywords: *Politics, Identity Politics, Democratic State.*

Pendahuluan

Sebagai Negara yang menganut sistem demokrasi, permasalahan negara Indonesia salah satunya adalah terkait dengan keanekaragaman. Permasalahan tersebut tentu tidak dapat di bendung karena negara Indonesia merupakan negara yang multi kultural, di mana banya keanekaragaman terkait agama, suku, budaya etnis dan bahkan politik. Keberagaman tersebut tidak hanya menjadikan konflik satu identitas akan tetapi juga merambah ke antar identitas. Konflik tersebut tentu akan merong-rong kekuatan bangsa terkait persatuan dan kesatuan dan dampak terburuknya akan memecah kesatuan bangsa Indonesia. Permasalahan ini semakin keruh dengan hadirnya kelompok yang mengatasnamakan nasionalisme, di mana mereka menggaungkan nasionalisme indonesia sebagai falsafah yang harus diterima dan dijalankan oleh seluruh rakyat Indonesia. Hal tersebut bertujuan untuk menghormati perjuangan para pendahulu serta menghormati perbedaan atas kemerdekaan yang diraih oleh bangsa Indonesia. Kelompok nasionalis ini biasanya terdiri dari mereka yang satu identitas, suku, agama, ras dan lain-lain. Sehingga biasanya mereka lah yang menunjukkan politik identitas paling terlihat berkaitan dengan arah politiknya (Lestari, 2018).

Konflik demokrasi tersebut akan semakin terlihat dan tidak terbandung arusnya ketika memasuki tahun politik. Dalam tahun politik, tidak bisa dihindarkan dengan yang namanya politik identitas. Konflik tersebut berkaitan dengan ketegangan antara kelompok superior dan kelompok inferior atau kelompok mayoritas dan kelompok minoritas . Politik identitas ini secara singkat dijabarkan sebagai fenomena politik yang mengarah pada perbedaan identitas. Perbedaan yang awalnya menjadi keberagaman berubah menjadi sebuah ancaman (Lesmana & Syafiq, 2022).

Fenomena politik identitas tersebut menjadi tantangan terberat bangsa, karena akan berujung pada disintegrasi bangsa. Menguatnya politik identitas ini dikarenakan *growing resentment* atau kebencian yang sangat besar akibat pengabaian terhadap pengakuan identitas yakni peran para aktor yang mempolitisasi identitas (Wingarta dkk., t.t.) Sehingga hal tersebut rentan terjadi gesekan antar individu dan golongan.

Adanyanya kecenderungan untuk membatasi daripada membebaskan tersebutlah sejatinya yang menjadi ancaman. Hal tersebut dikarenakan adanya ambiguitas klaim terhadap representasi sertanlegitimasi yang dilakukan oleh elit politik. Fenomena tersebut sering terjadi di Indonesia di mana politik identitas dibalut dengan kepentingan agama. Agama digunakan sebagai alat untuk menyuarakan aspirasinya. Penggunaan agama sebagai alat politik ini memang tidak bisa dihindarkan karena sikap religiusitas negara Indonesia. Selain itu, sikap fanatisme di Indonesia terhadap suatu agama tertentu juga masih sangat kental. Sehingga hal tersebut menjadikan para politisi untuk mengambil celah dalam hal menyuarakan atau menyerap aspirasi dengan melibatkan unsur keagamaan.

Penggunaan agama sebagai alat politik, saat ini mendominasi di Indonesia. Sehingga identitas keagamaan ini menjadi eksklusivisme agama terutamanya mayoritas umat agama di Indonesia. Sehingga dinamika tersebut menjadikan konflik sosial keagamaan (Lestari, 2018). Penggunaan agama sebagai alat tersebut menjadi hal yang rentan terhadap konflik, karena karakteristik negara Indonesia yang pada dasarnya adalah bersifat multikultural dan multiagama. Terlebih lagi, sifat masyarakat Indonesia yang masih belum terlalu faham politik dan mudah terhasut atau tersinggung jika dikaitkan dengan isu-isu sensitif seperti isu keagamaan. Hal tersebut tentu akan menimbulkan emosi dan berakibat mudah tersulut konflik vertikal maupun horizontal yang justru akan merugikan keutuhan bangsa Indonesia. Akan tetapi, di sisi lain politik identitas berdasarkan ras juga digunakan kelompok separatis untuk kepentingan memerdekakan diri dari pangkuan Republik Indonesia

Berkaca pada fenomena Pemilihan Umum tahun 2019 di mana politik identitas sangat terlihat dilakukan oleh para calon pemimpin negara. Politik identitas ketika itu mulai menguat ketika banyaknya narasi terkait konsep

populisme. Populisme merupakan sebuah ideologi yang membelah masyarakat menjadi dua bagian yakni rakyat dan penguasa dan berisikan wacana bahwa elit politik akan mewujudkan kepentingan rakyat secara nyata, karena rakyat merupakan bagian dari prioritas. Dalam populisme, penguasa atau elit pemerintah dianggap sebagai musuh rakyat, sehingga mereka meruakan dua kelompok yang saling berlawanan (Herianto1 & Wijanarko, 2022)

Dalam populisme ini, terjadi sikap sinisme kebencian kepada penguasa atau pejabat pemerintah yang ada. Para pejabat tersebut dituduh sebagai pihak yang koruptif, kebijakanya menindas rakyat, dan mereka lebih memeingtingkan ambisi pribadi daripada kemakmuran rakyat. Selain populime, dalam pemilu tahun 2019 juga muncul istilah anti kemapanan (*anti establishment*). *Anti establishment* ini merupakan pandangan yang bertentangan dengan kekuasaan dan selalu dikaitkan dengan identitas agama oleh para politisi populis untuk menarasikan bahwa pemerintah memarginalkan suatu kelompok tertentu. Seperti contoh pada gerakan 2019 ganti Presiden, *people power*, partai setan vs partai Allah (Ardipandanto, 2020). Jika politik identitas *anti establishment* ini digunakan terus menerus maka akan akan sangat berbahaya karena akan terjadi polarisasi dalam Negara yang berujung pada goyahnya persatuan dan kesatuan bangsa.

Melihat fenomena di atas, adanya politik identitas sangat menarik untuk dikaji karena tidak lain dikarenakan negara Indonesia merupakan negara demokrasi dengan multikultural serta terikat pada Pancasila dan semboyan Bhineka Tunggal Ika. Apalagi, berbagai kalangan menilai politik identitas sangat rawan bagi keutuhan persatuan dan kesatuan Bangsa Indonesia, khususnya dalam mengupayakan kehidupan demokrasi yang semakin baik dari waktu ke waktu. Maka dari itu, penelitian ini bertujuan untuk mengungkap politik identitas di Indonesia dalam kajian negara demokrasi di Indonesia.

Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif yakni dengan menjelaskan terkait fenomena politik identitas. Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan fenomenologis yang bersifat deskriptif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah *library research* atau penelitian kepustakaan yakni dengan menghimpun data dari berbagai literature baik berupa buku, jurnal dan penelitian-penelitian terdahulu. Setelah itu,, data dikumpulkan dalam bentuk dokumentasi. Setelah terkumpul langkah selanjutnya yakni dianalisis dengan teknik deskriptif kualitatif yakni dengan menggambarkan, menguraikan serta menjelaskan terkait politik identitas di Negara demokrasi.

Hasil dan Pembahasan

Konsep Politik Identitas

Politik identitas lahir dan memiliki daya tarik pada awalnya di Amerika Serikat sekitar tahun 1954 dimana pada saat itu sedang marak pembahasan mengenai isu diskriminasi terhadap agama, ras, gender karena banyak masyarakat yang merasa mendapat perlakuan kasar dan diskriminatif dari pemerintah Sebagai contoh nyata, kala itu di Amerika Serikat terjadi suatu tindakan diskriminasi yang sangat kental antara warga kulit hitam dan warga kulit putih. Martin Luther King pada saat itu menjadi satu dari banyak warga kulit hitam yang menuntut persamaan hak sipil warga kulit hitam dan kulit putih di Amerika Serikat, dan pergerakan ini memiliki dampak yang sangat besar pengaruhnya bahkan sampai hari ini.

Politik identitas merupakan sebuah penjabaran dari identitas politik yang dianut oleh warga negaranya yang berkaitan dengan pandangan politiknya. Tidak dapat dipungkiri bahwa memang politik identitas ini lahir daripada sebuah proses yang tidak mudah karena tercipta dari suatu kondisi golongan yang merasa terintimidasi dan terdiskriminasi oleh golongan mayoritas atau pemerintahan dalam menyelenggarakan sistem pemerintahan. Hal demikianlah yang menjadi dasar lahirnya politik identitas yang menjadi persoalan dalam suatu negara. Perbedaan yang menjadi tolok ukur keberagaman di Indonesia semakin

mempertegas perbedaan tersebut. Kestabilan negara akan terganggu apabila konflik yang dilatarbelakangi oleh politik identitas tersebut diabaikan.

Secara natural masyarakat Indonesia memiliki keberagaman dalam aspek kehidupan sosial yang mana hal tersebut tentu memiliki dampak terhadap keberagaman politik, terjadinya interrelasi berkaitan dengan identitas dan perubahan sosial dimaknai sebagai sesuatu yang bertentangan, baik secara terang-terangan ataupun secara sembunyi-sembunyi di antara warga karena pengaktualisasian identitas pada seseorang seringkali dapat mencerminkan atau mewakili dirinya sendiri maupun institusi dalam konteks entitas sebagaimana terbentuknya masyarakat Jawa, Madura, Bali, Tionghoa, Arab dan sebagainya; dalam konteks agama terdapat pada Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha dan Tridharma atau Khong Hu Chu.

Dalam prakteknya proses demokrasi di Indonesia seringkali melibatkan orientasi agama atau etnis tertentu, hal ini dapat kita lihat pada ciri khas partai-partai politik yang mengikuti pemilu sehingga masyarakat memiliki kecondongan untuk memilih partai yang sesuai dengan identitas dirinya karena merasa memiliki persamaan yang kuat dan seragam, dimana peristiwa ini sudah terjadi sejak era reformasi hingga sekarang. Sebagai contoh lahirnya penguatan identitas terhadap golongan tertentu adalah istilah Tionghoa di Indonesia pertama kalinya digunakan untuk menjadi nama perkumpulan Tiong Hwa Hwee Koan (THHK) yang didirikan pada tahun 1900. Dalam dokumen perkumpulan tersebut istilah Tjina sering digunakan sebagai bentuk pengenalan identitas mereka. Kemudian istilah Tionghoa semakin dikenal masyarakat luas seiringan dengan bangkitnya nasionalisme Tionghoa di Jawa pada dekade kedua, abad ke-20 Hindia Belanda. Kebijakan Pemerintah Hindia Belanda yang mengharuskan masyarakat Tionghoa untuk menetap pada satu wilayah tertentu (*wijkenstelsel*) dan hanya dapat keluar dari wilayah tersebut setelah mendapatkan kartu izin keluar, menjadikan etnis Tionghoa merasa adanya suatu deskriminasi terhadapnya dari Pemerintah Hindia Belanda (Haboddin, 2012).

Terdapat beberapa pengertian yang muncul mengenai pemahaman politik identitas sebagai sebuah teori dalam ilmu politik. Identitas atau jati diri adalah

pengakuan terhadap seorang individu atau suatu kelompok tertentu yang dikaitkan dilekatkannya rangkaian ciri-ciri atau karakteristik tertentu yang menjadi satu kesatuan menyeluruh yang menandainya masuk dalam satu kelompok atau golongan tertentu (Suparlan, 2004). Menurut Buchari sebagaimana dikutip oleh Juhana, mengemukakan bahwa konsep identitas secara umum dapat dimaknai sebagai sebuah citra yang membedakan individu atau suatu kelompok dengan individu atau kelompok lain, hal tersebut dilakukan secara simultan dalam interaksi sosial sampai memunculkan opini tertentu yang berkaitan dengan keberadaan individu atau kelompok tersebut (Buchari, 2014).

Sementara menurut Taufiq, politik identitas merupakan sebuah cara untuk memobilisasi massa dengan menggunakan identitas sebagai magnet pengambilan individu-individu demi berproses dalam menyelesaikan kepentingan anggota kelompoknya. Dengan demikian, melalui identitas dapat menarik tiap-tiap individu yang memiliki kesamaan dari berbagai aspek, misalnya agama, ras, suku, dan budaya. Demokratisasi yang menjunjung tinggi kebebasan menjadi dasar bagi setiap orang untuk bisa mengekspresikan dirinya termasuk dalam proses berpolitik, karena kebebasan di jamin oleh konstitusi sehingga memberikan rasa nyaman dan aman bagi setiap orang memberikan gambaran begitu tingginya popularitas sistem demokrasi Indonesia saat ini. Namun demikian hal ini memberikan suatu tantangan tersendiri karena kebebasan tersebut seolah memberi batasan yang jelas mengenai identitas seseorang baik dilihat dari aspek identitas agama, ras, bahasa, jenis kelamin, dll yang tentu berpengaruh kepada stabilitas berjalannya proses demokrasi itu sendiri.

Konflik yang berkembang akhir-akhir ini memperjelas keadaan bahwa konflik identitas sudah masuk ke wilayah demokratisasi pada masyarakat sehingga lahir istilah baru yakni demokrasi liar yang tidak hanya terbatas pada konsep demokrasi yang seharusnya diaplikasikan dalam kehidupan bernegara, akan tetapi ketidakbatasannya kebebasan yang diberikan oleh demokrasi di Indonesia pada saat ini telah menciptakan huru hara tanpa henti, bahkan tanpa segan telah menyentuh ranah keyakinan kelompok beragama. Perbedaan pendapat dan pandangan lintas agama menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam isu politik

masa kini. Permasalahan ini kemudian diperkeruh dengan kehadiran kelompok yang mengatasnamakan nasionalisme sebagai falsafah yang seharusnya diterima oleh masyarakat Indonesia untuk menghargai dan menghormati perbedaan yang sejak awal telah diakui bersamaan dengan kemerdekaan yang diraih oleh Indonesia. Kelompok nasionalis yang didominasi oleh berbagai identitas kesukuan, agama, ras, adat-istiadat, dll. Ini menjelma sebagai kelompok yang solid dalam menunjukkan ketegasan berkaitan arah politik identitasnya.

Salahsatu tujuan daripada lahirnya politik identitas adalah agar partai tertentu dengan ciri khas dan kesamaan tujuan pada sebuah golongan dapat di upayakan dalam bentuk penyaluran aspirasi sehingga dapat mempengaruhi kebijakan yang dipandang berharga sesuai dengan nasib sendiri atas dasar keprimordialan. Pada akhirnya kita harus menyadari bahwa bangsa ini bukan hanya karena proses rasional (berfikir), fisik (berkerja dan berperang) tetapi juga melalui proses yang penting yaitu adanya tepo seliro (merasakan dengan batin), bahwa kita adalah satu bangsa dengan keragaman (negara dan bangsa multikulturalisme) diantaranya keragaman etnis, suku dan agama. Politik identitas secara luas tanpa batas merupakan “*abuse of Indonesia democracy*” sehingga rentan sekali menciptakan kondisi yang berakibat memberikan ancaman keutuhan nasional Indonesia. Politik identitas dapat menghidupkan kembali pengkotakan, sekat-sekat atas dasar SARA yang sejatinya telah diserap dalam jiwa Pancasila yang telah disepakati dan diterima sebagai pijakan, landasan, dan pandangan hidup berbangsa dan bernegara oleh para pendiri Republik ini.

Konsep Demokrasi

Demokrasi secara bahasa berarti *demos* (rakyat) dan *kratos* (pemerintahan) (Huda, 2019). Dari dua kata tersebut, demokrasi diketahui sebagai sebuah system pemerintahan yang dianut oleh Negara di mana rakyat memiliki kedaulatan yang sepenuhnya. Dengan demikian secara sederhana demokrasi dapat didefinisikan sebagai kewenangan rakyat untuk memerintah. Pengertian demokrasi tersebut jauh berbeda ketika disandingkan dengan teokrasi, jika demokrasi lebih menekankan rakyat sebagai pihak yang diberikan kewenangan, namun teokrasi a yang

mengklaim berkuasa atas perintah Tuhan melalui wangsit, ilham, atau hasil pertapaan. Sementara pemerintahan teokrasi dipimpin seorang raja atas legitimasi pemimpin agama, pemimpin demokratis berkuasa di atas kedaulatan rakyat. Demokrasi juga memiliki perbedaan jika disandingkan dengan monarki. Karena pada system monarki lebih ditekankan atas dasar keturunan, maka pemimpinnya adalah raja dan para penerusnya. Sehingga dalam demokrasi ini mereka seperti rakyat biasa, raja, politisi memiliki kans yang sama untuk berkompetisi meraih kekuasaan (Mubarok, 2018)

Konsep demokrasi muncul dari pemikiran mengenai hubungan Negara dan hukum di Yunani. Demokrasi pada periode tersebut langsung dipraktikkan dalam hidup bernegara, artinya hak rakyat untuk membuat keputusan-keputusan politik seluruhnya secara langsung dijalankan oleh warga Negara. Sifat langsung ini dapat diterapkan di Yunani Kuno pada saat itu secara efektif karena kota Yunani hanya terbatas pada daerah dengan jumlah penduduk kurang lebih 300.000 dalam satu Negara. Lebih dari itu,

Kata demokrasi sejatinya memiliki beragam makna, salah satunya adalah tentang definisi yang mengaitkan demokrasi dengan mekanisme system pemerintahan suatu negarasebagai upaya untuk kedaulatan rakyat diatas kedaulatan Negara. Perdebatan terkait demokrasi kerap dijadikan sebagai wujud kebebasan hak asasi manusia. Hal tersebut dikarenakan dalam sejarahnya demokrasi identic dengan hak asasi manusia, karena perdebatan terkait demokrasi kerap kali berwujud dari kebebasan hak asasi manusia itu sendiri. Selain itu, dalam demokrasi juga tidak bias dilepaskan dengan berbagai factor seperti factor keterwakilan, berdirinya lebih dari satu partai politik, keterbukaan dalam merumuskan kebijakan, pemerintah yang transparan, serta pengawasan tindakan yang dilakukan pemerintah oleh rakyat. Secara garis besar, dapat diketahui bahwa dalam demokrasi ada yang namanya formulasi kebijakan yang dalam menentukan suaranya ditentukan oleh rakyat baik secara langsung atau pun tidak langsung sehingga warga masyarakat memiliki hak untuk memilih dan dipilih dalam keadaan bebas serta tidak ada paksaan.

Demokrasi juga tidak dapat dipisahkan dari negara hukum. Hadirnya sistem pemerintahan demokrasi tersebut sangatlah penting, karena sistem demokrasi menjadikan sistem pemerintah suatu negara dalam mewujudkan kedaulatan rakyat. Adapun salah satu prinsip demokrasi adalah tidak bisa dilepaskan dari trias politika (eksekutif, yudikatif dan legislatif). Hal tersebut dikarenakan untuk mewujudkan lembaga negara yang independen dan sejajar satu sama lain. Sehingga kesejajaran tersebut berfungsi sebagai saling mengawasi dan saling mengontrol berdasarkan prinsip *check and balances* (Adnan, 2019). Gagasan Demokrasi sangat memerlukan instrument hukum sebagai system di masyarakat mendapatkan keadilan yang merata di semua aspek baik ekonomi social dan yang lainnya. Ada tiga kriteria pokok dalam Negara demokrasi yang harus diperhatikan, di antaranya adalah (Stepan dkk., 2011):

1. Kompetisi. Sistem bernegara disebut demokratis jika setiap warga Negara berkompetisi untuk memperebutkan jabatan publik secara bebas tanpa paksaan.
2. Partisipasi. Partisipasi setiap warga Negara sangat diharapkan di Negara demokrasi, baik dalam hal pemilihan umum atau kebijakan publik. Keterlibatan tersebut sebagai bentuk tidak adanya pengecualian warga Negara dalam proses demokrasi.
3. Kebebasan sipil dan politik. Kebebasan tersebut merupakan bentuk Negara demokrasi di mana warga Negara bebas untuk berbicara, berekspresi, berserikat tanpa ada ancaman atau ketakutan. Mereka bias memilih agama tanpa ada paksaan, mereka juga memiliki kebebasan untuk bergabung atau menjadi kader partai politik mana pun untuk menyalurkan kepentingannya.

Analisis Problematika Politik Identitas Di Negara Demokrasi

Perjalanan demokrasi di Negara multikultural seperti Indonesia tidak selalu mulus. Hal tersebut dikarenakan banyaknya perbedaan-perbedaan yang terlampau banyak yang terjadi di masyarakat. Beberapa permasalahan yang muncul diantaranya adalah terkait pesta demokrasi. Berlangsungnya pesta demokrasi juga diikuti maraknya politik identitas. Politik identitas yang dimaksud adalah politik

yang mengedepankan suku, agama, budaya serta identitas kedaerahan untuk meraih suara terbanyak dan menarik simpati masyarakat. Bahkan mereka lupa terhadap hal yang paling penting dari pesa demokrasi yakni terkait adu gagasan tentang program kerja yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat. Akibatnya ketika mereka sudah mendapatkan suara yang diinginkannya mereka tidak peduli lagi bagaimana mengembalikan agar masyarakat rukun seperti sedia kala sebagaimana slogan Bhineka Tunggal Ika. Adanya politik identitas ini dilatar belakangi oleh kelompok sosial yang merasa terdiskriminasi oleh egara dan pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sehingga mereka berkumpul menjadi satu dan didasarkan identitas yang sama tersebut.

Politik identitas dapat menjadi ancaman demokrasi di Indonesia dikarenakan aspirasi politik yang hanya terpaku pada salah satu identitas tertentu. Selain itu, stabilitas negara juga akan hancur dikarenakan pertentangan antar identitas tertentu dalam negara demokrasi. Kelompok-kelompok yang ingin dominan dalam mendapatkan pengaruh politik menjadi faktor pemicu munculnya politik identitas. Permasalahan politik identitas di Indonesia, setidaknya jika dipaparkan terjadi karena (Mubarok, 2018):

1. Politik identitas sama halnya dengan memperbesar potensi mengecilkan peran atau menghilangkan peran identitas lain yang hidup di masyarakat. Biasanya untuk kepentingan politiknya, politikus tidak jarang menggunakan satu identitas tertentu yang dirasa memiliki keistimewaan untuk mengajak warga lain agar memilihnya dalam pemilihan umum. Kemudian selain itu, satu identitas yang dianggap istimewa tersebut akan mendapat keistimewaan yang cukup banyak terlebih jika politisi tersebut terpilih. Sehingga identitas yang lain menjadi sasaran diskriminasi dan tidak mendapatkan keistimewaan yang sama. Kemudian kemungkinan paling buruk, identitas-identitas kecil tersebut akan semakin terkucilkan dan bahkan dianggap tidak ada.
2. Politik identitas menutupi program kerja yang berkualitas. Bagaimana tidak, demokrasi yang seharusnya menjadi area untuk adu gagasan dan memperebutkan simpati masyarakat melalui program-program kerja yang berkualitas, karena politik identitas tadi para politikus cukup hanya

menunjukkan betapa hebatnya dia dengan identitas yang ia punyai saat ini. Sehingga secara esensi tidak layak menjadi seorang pemimpin.

3. Politik identitas cenderung memecah belah masyarakat daripada menyatukan masyarakat. Hal itu dikarenakan para pendukung merasa identitas mereka adalah kelompok istimewa sehingga mampu menyelesaikan masalah yang ada di daerahnya. Pada kesempatan yang sama, mereka juga membuat narasi seolah-olah mereka yang tidak dalam identitas yang sama berasal dari identitas yang tidak baik dan menimbulkan kehancuran. Adu narasi seperti hal tersebut tentu akan menciptakan gesekan-gesekan sosial, dan hal tersebut menimbulkan kebencian antar pendukung hingga kontes politik selesai perasaan kebencian tersebut terus berlanjut.

Dalam praktik politik identitas di Indonesia, masalah politik identitas masih banyak berlatar belakang etnis, agama, ideologi serta kepentingan lokal. Akan tetapi politik identitas di Indonesia didominasi terkait etnis dan agama. Indonesia dalam konteks politik identitas juga sangat berpotensi terjadi konflik relasi antara agama dan negara. Agama menjadi alat yang paling menarik digunakan oleh para politikus untuk meraup suara. Dalam negara demokrasi, politik identitas sebenarnya dibolehkan akan tetapi pada porsi yang tepat. Namun pada kenyataannya mereka berlebihan dan cenderung memantik sebuah konflik antar agama, suku dan budaya. Sehingga perlu dikedepankan narasi yang inklusif bahwa negara tidak bertentangan dengan agama dan negara memfasilitasi warga negara untuk beribadah sesuai agama dan kepercayaan. Menurut Siti Kholisoh, politik identitas dapat membawa beberapa dampak antara lain (Wingarta dkk., t.t.):

- a. Polarisasi sosial, yang berakibat pada terpecahnya kelompok masyarakat. Sehingga tantangannya adalah bagaimana pasca pesta demokrasi atau pemilu mereka dapat bersatu kembali sebagai bangsa yang satu tujuan.
- b. Perlakuan tidak setara. Perlakuan tersebut bisa terjadi secara sadar atau pun tidak sadar oleh para elit pemerintah atau politik. Biasanya mereka yang bukan dari identitas yang sama cenderung tidak memiliki kebebasan

berbicara serta terhambatnya partisipasi bebas di negara demokrasi. Padahal semua warga negara berhak memiliki perakuan yang setara oleh negara.

- c. Tergangguannya psikologi sosial di masyarakat, seperti mudah tersulut emosi karena beda pandangan dan pilihan, mudah tersinggung dan terprovokasi berita yang belum jelas kebenarannya dan lain lain.

Selain itu, politik identitas juga mengancam hajatan demokrasi yang ada di Indonesia diantaranya yakni:

- a. Politik identitas berpotensi menghilangkan identitas lain di masyarakat.
- b. Politik identitas menutupi gagasan dan program kerja yang berkualitas.
- c. Politik identitas akan memecah belah persatuan dan kesatuan karena sikap merasa identitas seseorang lebih baik daripada yang lainnya.

Politik identitas berakibat pula pada munculnya fenomena garis kuasa mayoritas atas minoritas berwajah tirai spiritualisme, di mana kelompok mayoritas akan memanfaatkan kondisinya agar mendapatkan keuntungan atau keistimewaan politik atas minoritas. Selain itu, politik identitas juga sengaja dibangun oleh para elit politik untuk melanggengkan kekuasaannya serta power sharing yang dibangun atas dasar identitas tertentu. Sehingga hal tersebut menjadikan *early warning* bagi negara demokrasi agar menjadi peringatan keras supaya fondasi persatuan dan kesatuan tidak roboh.

Kesimpulan

Politik identitas yang adalah politik yang mengedepankan suku, agama, budaya serta identitas kedaerahan untuk meraih suara terbanyak dan menarik simpati masyarakat. Dalam negara demokrasi, politik identitas sebenarnya dibolehkan akan tetapi pada porsi yang tepat. Namun pada kenyataannya mereka berlebihan dan cenderung memantik sebuah konflik antar agama, suku dan budaya. Politik identitas dapat menjadi ancaman demokrasi di Indonesia dikarenakan aspirasi politik yang hanya terpaku pada salah satu identitas tertentu sehingga berpotensi menghilangkan identitas lain di masyarakat. Selain itu, stabilitas negara juga akan hancur dikarenakan pertentangan antar identitas tertentu dalam negara demokrasi

Daftar Pustaka

- Adnan, I. M. (2019). *Negara Hukum Dan Demokrasi*. Trussmedia grafika.
- Ardipandanto, A. (2020). Dampak Politik Identitas Pada Pilpres 2019: Perspektif Populisme. *Politica*, 11(1).
- Buchari, S. A. (2014). *Kebangkitan Etnis Menuju politik Identitas*. YOI.
- Haboddin, M. (2012). Menguatnya Politik Identitas di Ranah Lokal. *Jurnal Studi Pemerintahan*, 3(1).
- Herianto1, H., & Wijanarko, R. (2022). Populisme Berwajah Politik Identitas Keagamaan di Indonesia,. *Jurnal Filsafat Indonesia*, 5(1).
- Huda, U. N. H. (2019). *Hukum Partai Politik dan Pemilu di Indonesia*. Fokus Media.
- Lesmana, R. P. D., & Syafiq, M. (2022). Fanatisme Agama Dan Intoleransi Pada Pengguna Media Sosial. *Character : Jurnal Penelitian Psikologi*, 9(3).
- Lestari, Y. S. (2018). Politik Identitas Di Indonesia: Antara Nasionalisme Dan Agama. *Journal of Politics and Policy*, 1(1).
- Mubarok, H. (2018). Demokrasi, Politik Identitas, dan Kohesi Sosial: Peluang dan Tantangan Strategi Dakwah untuk Menghalau Provokasi Politik di Indonesia. *Jurnal Bimas Islam*, 11(II).
- Stepan, Linz, A., & Yadav, Y. (2011). *Crafting State-Nations: India and other Multinational Democracies*. JHU Press.
- Suparlan, P. (2004). *Hubungan Antar Suku Bangsa*. KIK Press,.
- Wingarta, I. P. S., Helmy, B., Hartono, D., Mertadana, I. W., & Wicaksono, R. (t.t.). Pengaruh Politik Identitas Terhadap Demokrasi Di Indonesia. *Jurnal Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia*, 9(4).